

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
A. PENGUNGKIT		36,30				#DIV/0!	#DIV/0!			
L. PEMENUHAN		14,60				#DIV/0!	#DIV/0!			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00				2,00	1,00			
i. Tim Reformasi Birokrasi		0,40				0,40	1,00			
	a.		Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	A/B/C	A	1,00		Setjen Wantannas telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 30 Tahun 2022	1. Kepesjesen Wantannas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Dokumentasi pembentukan Tim RB (Usulan pembentukan tim/Nodin)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
	b.		Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00		Tim Reformasi Birokrasi. Setjen Wantannas telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	1. Persetjen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Roadmap RB Tahun 2020 - 2024; 2. Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi Debang Setjen Wantannas Tahun 2021 dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2020; 3. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 4. Laporan Tindak Lanjut atas movev RB semesteran	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
	c.		Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1,00		Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	1. Laporan Movev RB Triwulanan 2. Laporan pelaksanaan RB semesteran/tahunan 3. Laporan Tindak Lanjut atas movev RB semesteran/tahunan	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
ii. Road Map Reformasi Birokrasi		0,40				0,40	1,00			
	a.		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021	1. Persetjen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Roadmap RB Tahun 2020 - 2024; 2. Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
	b.		Terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	A/B/C/D	A	1,00		Seluruh anggota organisasi secara berkala telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Dokumentasi jam pimpinan, sosialisasi dan internalisasi tentang Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 (Nodin, Foto, dan Notulen)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
	c.		Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	A/B/C	A	1,00		Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map	1. Persetjen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Roadmap RB Tahun 2020 - 2024; 2. Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		0,80				0,80	1,00			
	a.		Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	A/B/C/D	A	1,00		Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB di lingkungan Depolstra dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB	1. Nodin penunjukan Tim Asesor dari Kedepuitan 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Asesor tingkat instansi dan unit kerja	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1,00	Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas sebagaimana telah dituangkan dalam LKE PMPRB Depolstra tahun 2021	1. LKE PMPRB Depolstra 2. Dokumentasi kegiatan pengisian dan reviu LKE PMPRB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C		Blm Diisi	Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 dan telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Laporan Tindak Lanjut atas evaluasi RB tahun 2020 (semesteran/tahunan)	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Laporan Tindak Lanjut atas evaluasi RB tahun 2020 (semesteran/tahunan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1,00	Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	1. Laporan Monev RB Triwulanan 2. Laporan pelaksanaan RB semesteran/tahunan 3. Laporan Tindak Lanjut atas evaluasi RB tahun 2020 (semesteran/tahunan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja				0,40	1,00		
			a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Kepesjesen Wantannas Nomor 136 Tahun 2021 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitan Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 4. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran 5. Dokumentasi kegiatan RB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1,00	Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja	1. Kepesjesen Wantannas Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Role Model di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Kepesjesen Wantannas Nomor 33 Tahun 2020 Tentang <i>Agent of Change</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas 4. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 5. Dokumentasi kegiatan Agen Perubahan (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			2 DEREGULASI KEBIJAKAN				1,00	1,00		
			- Harmonisasi				1,00	1,00		
			a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00	unit Depolstra tidak membuat produk peraturan kebijakan dikarenakan kewenangan terdapat di pusat	1. Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan Setjen Wantannas Semester II Tahun 2021. 2. Dokumentasi Penyusunan Persejten Baru adalah Persejten No 6 Tahun 2021 tentang Renja 3. Dokumentasi Penyusunan Persejten Mengganti: Persejten No 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00		unit Depolstra tidak membuat produk peraturan kebijakan dikarenakan kewenangan terdapat di pusat	1. Kepesjesen nomor 12 Tahun 2022 ttg Progtuk Tahun 2022. 2. Persetjen Tata Naskah Dinas No 4 Tahun 2021 3. Persetjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern 4. Persetjen Wantannas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis 5. Persetjen Wantannas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Tulis Produk	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				3 PENATAAN DAN Penguatan ORGANISASI				2,00				
				i. Evaluasi Kelembagaan				1,00				
				a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah melakukan evaluasi dilingkungannya untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Kepesjesen Wantannas No. 151/2021 tentang tentang Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah melakukan evaluasi dilingkungannya yang mengukur seluruh jenjang organisasi dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 Tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 Tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Persetjen Wantannas No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas 4. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021 5. Kepesjesen Wantannas No. 154/2021 tentang Tim Pokja Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas 6. Naskah Akademik dan Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah melakukan evaluasi dilingkungannya yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021 2. Kepesjesen Wantannas No. 154/2021 tentang Tim Pokja Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas 3. Naskah Akademik dan Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah melakukan evaluasi dilingkungannya yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021 2. Kepesjesen Wantannas No. 154/2021 tentang Tim Pokja Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas 3. Naskah Akademik dan Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya	a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah melakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja dilingkungannya dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021 2. Kepesjesen Wantannas No. 154/2021 tentang Tim Pokja Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas 3. Naskah Akademik dan Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A	1,00		Depolstra telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya dan terlibat dalam evaluasi kelembagaan setjen wantannas	1. Laporan evaluasi kelembagaan pemerintah Setjen Wantannas tahun 2021 2. Kepesjesen Wantannas No. 154/2021 tentang Tim Pokja Internal Revitalisasi dan Validasi Wantannas menjadi Wankamnas 3. Naskah Akademik dan Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1,00		peta proses bisnis disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dimana terdapat 3 proses yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Persetjen Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Renstra Setjen Wantannas 3. Persetjen Nomor 25 Tahun 2020 Tentang IKU	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0,67		Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP yaitu sebanyak 15 SOP	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Daftar SOP AP dan Teknis Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	C	0,00		Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Daftar SOP lintas fungsi (peta level n)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1,00		telah dilakukan penerapan SOP Setjen Wantannas disetiap jenjang unit kerja yang disertai dengan monitoring pelaksanaannya secara berkala	1. Persetjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1,00		telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi dari penerapan peta proses bisnis dan SOP agar prosedur dan mekanisme kerja dapat berjalan dengan jelas dan terukur	1. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	A	1,00		telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi dari penerapan peta proses bisnis dan SOP agar prosedur dan mekanisme kerja dapat berjalan dengan jelas dan terukur	1. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50				#DIV/0!	#DIV/0!		
				a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak			Blm Diisi	Pimpinan dalam hal ini Deputi, telah berkomitmen dalam memenuhi kaidah - kaidah keterbukaan informasi publik dengan menyelenggarakan layanan PPID agar pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C			Blm Diisi	pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40				1,30	0,93		
				i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai	0,20				0,20	1,00		
				a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1,00		Dalam hal ini perhitungan pengisian kebutuhan pegawai disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui proses asistensi dan persetujuan dari BKN dan Kemenpanrb	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Screenshot Bazeting 5 tahun pada aplikasi E-Formasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	1,00		Telah terdapat analisis jabatan dan analisis beban kerja masing - masing jabatan yang terdapat pada Setjen Wantannas	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Screenshoot Bazzeting 5 tahun pada aplikasi E-Formasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	A	1,00		Telah terdapat analisis jabatan dan analisis beban kerja masing - masing jabatan yang terdapat pada Setjen Wantannas	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Surat Menteri PanRB No B/1381/M.SM.04.00.2021 tentang Surat persetujuan Penetapan Perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Screenshoot Bazzeting 5 tahun pada aplikasi E-Formasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Pengembangan Pegawai Berbasis				0,20	0,20	1,00		
				a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	A	1,00		Pengembangan kompetensi pegawai disusun setiap akhir tahun berjalan untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup sebagai pengembangan kemampuan pegawai tersebut	1. Laporan peningkatan kompetensi SDM 2. Dokumentasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi (sertifikat, foto, dll)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	A	1,00		Pengembangan kompetensi pegawai disusun setiap akhir tahun berjalan untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup sebagai pengembangan kemampuan pegawai tersebut	1. Laporan peningkatan kompetensi SDM 2. Dokumentasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi (sertifikat, foto, dll)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				iii. Penetapan Kinerja Individu				0,40	0,30	0,75		
				a. Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	A	1,00		Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1,00		Dokumen SKP yang terbaru telah memuat ukuran kinerja individu yang berkesesuaian dengan indikator kinerja individu di atasnya	a. Penilaian kinerja Individu sesuai dengan penilaian kinerja individu di atasnya b. SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1,00		Dokumen SKP yang terbaru telah memuat ukuran kinerja individu yang berkesesuaian dengan indikator kinerja individu di atasnya	a. Penilaian kinerja Individu sesuai dengan penilaian kinerja individu di atasnya b. SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	D	0,25		Pengukuran kinerja individu masih dilakukan secara tahunan	a. Penilaian kinerja Individu sesuai dengan penilaian kinerja individu di atasnya b. SKP pegawai tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	D	0,25	monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu masih dilakukan secara tahunan	SKP pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	A	1,00	Hasil penilaian kinerja individu digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti promosi, mutasi dan pendidikan dan pelatihan	Laporan monitoring Evaluasi Kinerja Individu	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode	0,20			0,20	1,00		
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1,00	aturan kode etik sebagai pedoman pengambilan keputusan lebih lanjut	Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	1,00	dokumen laporan terkait pelaksanaan/implementasi dari kode etik maupun penerapan disiplin yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Sesjen Wantannas Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20			0,20	1,00		
			a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	A	1,00	Depolstra telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan Depolstra	Evaluasi jabatan berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah dilaksanakan evaluasi kembali pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM, yang dituangkan dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	A	1,00	Evaluasi jabatan berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi kembali pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM, yang dituangkan dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021	Evaluasi jabatan berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah dilaksanakan evaluasi kembali pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM, yang dituangkan dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Peta jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20			0,20	1,00		
			- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1,00	sistem informasi yang dibangun bersifat interface dalam arti pegawai dapat berinteraksi tanpa harus tatap muka	1. Aplikasi SIDIK 2. Aplikasi BKN berupa MYSAPK	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			6. Penguatan Akuntabilitas	2,50			2,45	0,98		
			i. Keterlibatan pimpinan	1,00			0,95	0,95		

			a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	B	0,67	dalam penyusunan rencana startegis Setjen Wantannas, pimpinan Depolstra sebagaimana yang tertuang dalam Kepesjesen Nomor 58 Tahun 2019 tentang penetapan tim renstra	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. Surat undangan No UND-30/PR.01/2020 perihal Rapat pemutakhiran Renstra Wantannas 2020 - 2024 3. Kepesjesen Nomor 58 Tahun 2019 tentang penetapan tim renstra 4. Dokumentasi penyusunan renstra Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1,00	menindaklanjuti Nodin 01/PR.02/2022 Perihal permintaan dokumen PK TA 2022 Depolstra telah menyusun perjanjian kinerja TA 2022 dan telah disetujui oleh pimpinan unit eselon 1 dan eselon 2 dari masing - masing unit kerja	1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumentasi Penyerahan Perjanjian Kinerja Unit Kerja 2021 dan 2022 3. Nodin 1251/PR.01/2020 Perihal Penyampaian dokumen PK TA 2021 dan Nodin 01/PR.02/2022 Perihal permintaan dokumen PK TA 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1,00	pada tahun 2021 dan 2022 (sedang berlangsung) pimpinan telah melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja (secara berkala) berupa kegiatan rapat evaluasi kinerja setiap triwulan dan tertuang dalam laporan periodik Depolstra	1. LAKIP Depolstra tahun 2021 2. Laporan periodik Depolstra (Bulanan, Triwulan, Tahunan) 3. Dokumen acara Evaluasi Triwulan I s/d IV TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	1. dokumen rencana strategis Setjen Wantannas TA 2020 - 2024 telah disetujui oleh Sesjen Wantannas sebagai pimpinan lembaga yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. mengenai strategi pencapaian renstra Setjen Wantannas TA 2020 - 2024 yang tertuang dalam IKU dan IKU Manual 2020-2024 telah disetujui oleh Sesjen Wantannas sebagai pimpinan lembaga melalui Persetjen No. 25 tahun 2020	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 - 2024 2. Persetjen No. 25 tahun 2020 tentang IKU dan IKU Manual 2020-2024 di Lingkungan Setjen Wantannas 3. Dokumentasi penyusunan renstra Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	dokumen perjanjian kinerja Depolstra telah ditandatangani dan disetujui oleh Deputy	1. Dokumen Perjanjian Kinerja Depolstra Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Depolstra Tahun 2021 dan 2022 3. Dokumentasi Penandatanganan dan Penyerahan Perjanjian Kinerja dan RAK (foto, notulen)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1,00	pencapaian rencana aksi kinerja telah dipantau dan dimonitor oleh Deputy melalui rapat evaluasi kinerja setiap triwulan	1. Dokumen rencana aksi kinerja Depolstra Tahun 2021 dan 2022 2. Dokumentasi rapat monev kinerja (foto, nodin, notulen) 3. Laporan Monev Kinerja Periodik (Triwulan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja				1,50	1,00			
			a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1,00	seluruh unit telah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, seperti seluruh Keudeputian mengikuti sosialisasi SPIP, RSP	1. Dokumentasi sosialisasi yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja (foto dan notulen) 2. Dokumentasi Sosialisasi Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 3. Dokumentasi sosialisasi aplikasi E-Monev Bappenas Tahun 2021 4. Dokumentasi sosialisasi aplikasi Smart DJA Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo	

			b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1,00	pada tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui e-monev bappenas dan upload data kinerja; Renstra; Renja; IKU; PK; rencana aksi kinerja pada aplikasi esr.menpan.go.id setiap tahun	1. LAKIP Depolstra tahun 2021 2. Laporan Periodik Depolstra Tahun 2021 dan 2022	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			7 Penguatan Pengawasan				2,20	1,00		
			i. Gratifikasi				0,30	1,00		
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>	a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1,00	Tim UPG Setjen Wantannas melibatkan perwakilan dari unit kerja sebagai UPG Unit Kerja dan melibatkan dalam sosialisasi gratifikasi	1. Sosialisasi mengenai gratifikasi yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat 2. Penyediaan media publikasi melalui google site bit.ly/UPGSetjenWantannas, telah diinformasikan kepada seluruh pegawai dan dapat dengan mudah diakses karena berbasis google dan terdapat sarana pembelajaran berbentuk video dan dokumen portable (pdf) 3. Benchmarking mengenai Gratifikasi yang menghadirkan narasumber dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi LAN dan diikuti perwakilan dari Biro	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Diisi	UPG Unit Kerja melaporkan secara berkala praktek gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi dari UPG Unit Kerja	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	UPG Pusat melaporkan hasil evaluasi atas pengendalian gratifikasi	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi Semester II Tahun 2020 Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1,00	Seluruh pegawai di Unit Kerja Depolstra melaporkan surat pernyataan penolakan/penerimaan Gratifikasi kepada UPG Pusat	Surat pernyataan pegawai terkait penolakan/penerimaan Gratifikasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Penerapan SPIP				0,30	1,00		
			a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1,00	Setjen Wantannas telah membangun lingkungan pengendalian dan melibatkan unit kerja	1. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional. 2. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. 3. Laporan hasil pelaksanaan penilaian mandiri maturitas oleh Tim Penilai Maturitas SPIP Setjen Wantannas pada tahun 2021 berada pada level 4, konfirmasi nilai 4.023 dengan definisi Terkelola dan Terukur (menunggu penyesuaian aplikasi penilaian SPIP Terintegrasi) 4. Laporan penyelenggaraan SPIP Semester I dan II TA.2021 5. manajemen dan APiP telah mengikuti diklat SPIP terintegrasi terlampir dokumentasi diklat SPIP terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D		Blm Diisi	Unit Kerja Setjen Wantannas telah melakukan penilaian seluruh risiko di lingkungannya	Laporan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Wantannas Depolstra TA. 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D		Blm Diisi		Setjen Wantannas telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, dalam hal ini unit kerja melaporkan penilaian risiko di lingkungannya yang kemudian disampaikan kepada manajemen dalam hal ini bagian perencanaan, dan atas hasil penilaian risiko dilakukan reviu manajemen risiko, atas hasil reviu disampaikan ke unit kerja untuk dilaksanakan mitigasi risiko oleh unit kerja	1. Laporan Hasil Audit Internal Triwulanan TA 2021 2. Laporan Hasil Reviu TA 2021 3. Laporan Wasdal pengelolaan BMN 4. Laporan Pengendalian Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, dan Dumas 5. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Wantannas TA.2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1,00		Setjen Wantannas telah menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait termasuk seluruh personil pada unit kerja	1. Sosialisasi Pengisian dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi dengan mengundang narasumber dari BPKP 2. undangan,daftar hadir dan foto terkait sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1,00		Setjen Wantannas telah melakukan pemantauan pengendalian intern secara berkala kepada unit kerja,	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Setjen Wantannas periode semesteran TA 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1,00		Unit kerja pada Setjen Wantannas telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Laporan Monev Penerapan SPIP Semester I dan Semester II thn 2021 (tentatif)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50			0,50	1,00			
			a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		Unit Kerja tidak melaksanakan secara langsung menampung pengaduan masyarakat namun terpusat pada tim pengaduan masyarakat di biro PSP, dan berdasarkan hasil bahwa tidak ada laporan terkait pengaduan masyarakat selama tahun 2021	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1,00		Setjen Wantannas telah melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan disampaikan ke unit kerja,	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00		Setjen Wantannas telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan disampaikan ke unit kerja	Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iv.	Whistle Blowing System	0,30			0,30	1,00			
			- Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		Whistle blowing system telah disosialisasikan ke seluruh pegawai termasuk di unit kerja	1. Banner, Stiker, website, buku, 2. Sosialisasi mengenai Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30			0,30	1,00			
			a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit pada Setjen Wantannas	Sosialisasi mengenai Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat yang menghadirkan narasumber dari KPK dan diikuti oleh seluruh pegawai Setjen Wantannas, Surat Edaran Nomor SE-01/Pl.04.04/2021 Tentang Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, dan Pengaduan Masyarakat	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan pada Setjen Wantannas	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1,00		Penanganan Benturan Kepentingan telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala,	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	A	1,00		Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti,	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I dan II Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			vi. Pembangunan Zona Integritas	0,50			0,50	1,00			
			a. Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1,00		Setjen Wantannas mengajukan Deputi Politik dan Strategi sebagai unit pencanangan ZI menuju WBK	1. Dokumen Pencanangan Zona Integritas 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C		Blm Diisi		Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara intensif sesuai pedoman Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas,	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 3. Instruksi Sesjen tentang Dokumen Rencana Pembangunan ZI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	A	1,00		Monitoring dan evaluasi atas zona integritas telah dilakukan secara berkala terkait Proses Pembangunan ZI,	1. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 2. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan TPI ZI menuju WBK di lingkungan Setjen Wantannas 3. LKE ZI Tahun 2020 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas Semester I dan II Tahun 2020	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50			2,50	1,00			
			i. Standar Pelayanan	0,40			0,40	1,00			
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1,00		Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Kepesjesen Nomor 52 Tahun 2013	1. Kepesjesen Nomor 52 Tahun 2013 tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas 2. Maklumat pelayanan tahun 2020	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

				b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1,00		Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan sebagaimana tertuang dalam Kepesjesen Nomor 52 Tahun 2013 dan dipublikasikan pada website Wantannas	1. Maklumat pelayanan tahun 2020 2. telah dipublikasikan dalam website Wantannas 3. Kepesjesen Nomor 52 Tahun 2013 tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1,00		sudah dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan Setjen Wantannas dan menambah fungsi kegiatan	1. proses review dan perbaikan standar pelayanan mengikutsertakan stakeholders (notulen, foto, dan nodin) : a. Hasil reviu keterbukaan informasi publik bersama KIP b. Sosialisasi Tata Kelola PPIID 2. telah ada laporan Hasil Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan tahun 2021 3. Pelaksanaan kegiatan sosial (Vaksinasi Nasional) 4. Menginisiasi temu awak media nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				ii. Budaya Pelayanan Prima				0,40		0,40	1,00	
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	A	1,00		Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkala, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	1. Pelatihan Sosialisasi PPIID tahun 2021 2. Pelatihan Penyusunan Indeks Keamanan Informasi dengan BSSN tahun 2021 3. Pelatihan Penulisan Berita Cepat Tahun 2021 4. Pelatihan Fotografi Tahun 2021 5. Pelatihan Penulisan Jurnal Tahun 2021 6. Pelaksanaan kegiatan sosial (Vaksinasi Nasional) 7. Menginisiasi temu awak media nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum <i>online</i> , hanya dapat diakses di tempat layanan (<i>intranet</i> dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1,00		Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	1. Screenshot website (www.wantannas.go.id), majalah, dan buletin (Catra), instagram (IG:@setjen_wantannas), youtube (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional), email (setjen@wantannas.go.id) 2. Terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional : a. RRI b. KOMINFO (bako humas) c. ANTARA d. LKPP (LPSE, E-catalog) e. KPK (GOL) f. Kemenkumham (JDIH) g. ANRI (srikandi) h. Kemenpanrb (SPAN L4POR)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1,00		Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan sebagaimana tertuang dalam Kepesjesen Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015	1. Kepesjesen Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Setjen Wantannas 2. Kepesjesen Wantannas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1,00		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan	Kepesjesen Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Setjen Wantannas.	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D		Blm Diisi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras melalui website Wantannas dan PPIID	1. www.wantannas.go.id, 2. website PPIID, 3. aplikasi lainnya (SIMDOKJI, SIDIK)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			f. Telah terdapat inovasi pelayanan	a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1,00	Inovasi pelayanan tahun 2021 dalam bentuk percepatan vaksinasi nasional (sistem pentahelix) dengan lokus di Jawa Barat telah mendapatkan pengakuan secara nasional sebagaimana dihadiri langsung oleh Wapres dan sambutan pelaksanaan dari Presiden dan telah direplikasi oleh instansi lain	1. Sprint Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi kegiatan	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60			0,60	1,00		
			a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1,00	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	Telah ada layanan sarana kontak/pengaduan/saran pada website Setjen Wantannas dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! Dengan petugas khusus yang menangani dalam Kepesjesen Wantannas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	A	1,00	Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi	1. Kepesjesen Wantannas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Setjen Wantannas 2. Unit pengelola khusus adalah Biro PSP	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D		Blm Diisi	Tindak lanjut pengaduan tercantum dalam Laporan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi Tahun 2021	laporan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala (semester) Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1,00	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala	Laporan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70			0,70	1,00		
			a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1,00	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun	a. Laporan IKM TW I Tahun 2021 b. Laporan IKM TW II Tahun 2021 c. Laporan IKM TW III Tahun 2021 d. Laporan IKM TW IV Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1,00	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	Laporan dapat diakses di website Setjen Wantannas dan dapat diakses secara online dan offline	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana	Laporan Tindak Lanjut IKM Tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
		v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40			0,40	1,00			
			a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1,00		Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	1. aplikasi KRISNA, SAKTI (Perencanaan) 2. aplikasi OM-SPAN, SILABI, SAIBA (keuangan) 3. SPAOT, SIREBO, SIPUT-SMS (Ortala) 4. SIDIK, E-Kinerja (Kepegawaian) 5. SIMAK BMN, RKBMN, SIPKB (perengkapan) 6. SRIKANDI (TUP) 7. E-MAWASPBNP, GOL (Wasin)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1,00		Perbaikan dilakukan secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam 19 laporan pemeliharaan peralatan sitem informasi	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sifso Upgrade Pemeliharaan dan Update Sistem (nota dinas online menjadi kesekretariatan)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			II. REFORM	21,70			17,03	0,78			
			1. MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00			3,00	1,00			
			i. Komitmen dalam Perubahan	1,50			1,50	1,00			
			a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	1 Agen 1 Perubahan	%	100,00%	1,00		terdapat agen perubahan Depolstra sebanyak 1 dan 1 perubahan yang dibuat	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Agen Perubahan		Jumlah	1,00				2. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	1,00				1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100,00%	1,00		terdapat agen perubahan Depolstra sebanyak 1 dan 1 perubahan yang dibuat	1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2. Rencana Kerja Agen Perubahan Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	2,00				2. Laporan Monev rencana kerja Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		Jumlah	2,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Komitmen Pimpinan	1,00			1,00	1,00			
			- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1,00		Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 tahun 2020 Tentang Roadmap RB Setjen Wantannas Tahun 2020 - 2024 2. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 3. Laporan Monev RB Triwulanan 4. Laporan pelaksanaan RB triwulanan 5. Laporan Tindak Lanjut atas monev RB semesteran 6. Dokumentasi kegiatan RB (Nodin, Notulen, dan Foto)	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii. Membangun Budaya Kerja	0,50			0,50	1,00			
			- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1,00		Setjen Wantannas telah melakukan evaluasi pengembangan budaya kerja kepada setiap pegawai Setjen Wantannas	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			2. DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00			1,00	0,50			
			- Peran Kebijakan	2,00			1,00	0,50			
			a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	A	1,00		unit Depolstra tidak membuat produk peraturan kebijakan dikarenakan kewenangan terdapat di pusat	1. Persetjen Wantannas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Tata cara pembentukan perundang-undangan Persetjen dan Kepesjesen 2. Dokumentasi penyampaian naskah konsepsi usulan pembentukan Persetjen dan Kepesjesen	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja	Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	0,00%	0,00	unit Depolstra tidak membuat produk peraturan kebijakan dikarenakan kewenangan terdapat di pusat	1. Peresjesen Nomor 43 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat 2. Peresjesen Nomor 6 Tahun 2018 tentang standar prosedur layanan informasi dan dokumentasi 3. Kepesjesen Nomor 182 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi		Jumlah	0,00				https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			3 PENATAAN DAN Penguatan Organisasi	1,50			1,50	1,00		
			- Organisasi Berbasis Kinerja	1,50			1,50	1,00		
			- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	A	1,00	dalam penyusunan Peresjesen Wantannas Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis melibatkan perwakilan Depolstra dan menyampaikan usulan secara langsung dalam rapat-rapat	Peresjesen Wantannas Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75			2,13	0,57		
			i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0,50			0,00	0,00		
			- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	D	0,00	Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	Peresjesen Wantannas nomor 2 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Setjen Wantannas	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,25			0,63	0,50		
			a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0,50	implementasi SPBE mampu mendorong pelaksanaan manajemen internal serta pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	1. Portal Setjen Wantannas di www.wantannas.go.id 2. Portal PPID di www.wantannas.go.id/ppid 3. Portal E-Gov di egov.dkn.go.id 4. Portal LPSE di www.lpse.wantannas.go.id	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0,50	implementasi SPBE mampu mendorong pelaksanaan manajemen internal serta pelaksanaan pelayanan internal yang lebih cepat dan efisien	SIDIK, SAKTI, KRISNA, SRIKANDI, SIMDOKJI, SIMAK BMN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00			1,50	0,75		
			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75	transformasi digital telah dilakukan Setjen Wantannas dengan mengubah dokumen saran kebijakan dari konvensional menjadi digital. Hal ini diakomodasi oleh aplikasi SIMDOKJI sebagai database yang memuat saran kebijakan strategis Wantannas dari tahun ke tahun	aplikasi SIMMDOKJI	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75		transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu membantu mempermudah aktivitas rutin yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Hal ini dapat diakomodasi oleh penganggaran dan keuangan (SAKTI), perencanaan (KRISNA), kepegawaian (SIDIK), dan pengelolaan BMN (SIMAK BMN)	aplikasi SAKTI, KRISNA, SIDIK, SIMAK BMN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	B	0,75		pada bidang pelayanan publik Setjen Wantannas telah berupaya melakukan transformasi digital sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi melalui portal Setjen Wantannas. Selain itu pada bidang pelayanan pengadaan telah digunakan SPSE yang telah berkolaborasi dengan layanan perencanaan (SIRUP), layanan E-katalog (E-purchasing), dan SIMWAS P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri)	aplikasi SIRUP, E-purchasing, SIMWAS P3DN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00			2,00	1,00			
			i. Kinerja Individu	1,00			1,00	1,00			
			- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1,00		dalam hal ini berorientasi pada outcome level diatasnya	Dokumen SKP Pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Assessment Pegawai	0,50			0,50	1,00			
			- Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	A	1,00		hasil asesmen merupakan salah satu pertimbangan pimpinan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	1. Rekomendasi dalam sidang baperjakat (notulen baperjakat) 2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50			0,50	1,00			
			- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100,00%	1,00		jumlah pelanggaran disiplin dapat diminimalisasi dengan bantuan aplikasi SIDIK	Laporan movev kelompok kepegawaian dan hukum tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pelanggaran tahun ini		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75			2,30	0,61			
			i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00			0,80	0,80			
			- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien						pada tahun 2021 dan 2022 program dan kegiatan Setjen Wantannas telah menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	RKAKL tahun 2021	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05j8
			- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:								https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah program		Jumlah	1,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

			- Eselon I/II		Jumlah	9,00					https://bit.ly/3ay05j8
			- Lainnya		Jumlah	0,00			di Depolstra tidak terdapat jabatan lainnya selain eselon I/II yang wajib lapor LHKPN		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05j8
			- Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah	9,00					https://ortala.wantannas.go.id/sirebo https://bit.ly/3ay05j8
			ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	0,60				0,00	0,00		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Persentase penyampaian LHKASN	Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	0,00%	0,00		berdasarkan struktur organisasi Persejten No 80 tahun 2020 tentang SOTK, tidak terdapat eselon III dan IV serta jabatan fungsional di Depolstra	Screenshot LHKASN	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Eselon III		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Eselon IV		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah Fungsional dan Pelaksana		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60				0,60	1,00		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100,00%	1,00		Depolstra telah menyediakan kanal pengaduan masyarakat namun belum terdapat laporan masuk terkait pengaduan masyarakat	screenshot LAPOR!	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah	0,00					https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75				3,75	1,00		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50				2,50	1,00		
			a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Berilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1,00		telah dilakukan perbaikan atas pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana peralatan sistem informasi tahun 2021	inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kualitas Sarana dan prasaran sistem informasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Jalur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100,00%	1,00		1. Mempermudah jalur birokrasi naskah yang sudah diproses atau belum 2. otenifikasi jumlah yang divaksinasi dapat terhubung secara langsung dengan website wantannas	1. Mempermudah untuk mengetahui surat yang sudah direpon di Setneg 2. Mempermudah kegiatan pelaksanaan vaksinasi nasional	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		Jumlah	4,00				layanan PPID, LPSE, Kaminfo, Penyerapan Aspirasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah	4,00				layanan PPID, LPSE, Kaminfo, Penyerapan Aspirasi	https://bit.ly/3ay05j8 https://ortala.wantannas.go.id/sirebo
			ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	1,25				1,25	1,00		https://ortala.wantannas.go.id/sirebo

